

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PROVINSI SE-SUMATERA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19

Novalia Afri¹⁾, Nelly Masnila²⁾, M. Husni Mubarak³⁾

¹⁻³⁾Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

email : afrinovalia04@gmail.com¹⁾, nellymasnila@polsri.ac.id²⁾, mhusnimubarak@polsri.ac.id³⁾

Abstrak

Fenomena Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 sangat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Pulau Sumatera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebelum dan saat Covid-19 serta untuk mengetahui adakah perbedaan antara sebelum Pandemi Covid-19 dan saat Pandemi Covid-19. Terdapat 10 Pemerintah Provinsi se-Sumatera yang dijadikan sampel penelitian dengan teknik pengambilan sampel jenuh. Penelitian ini menggunakan data sekunder berasal dari laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI. Penelitian ini menggunakan alat analisis Uji Beda. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata rasio Pertumbuhan dan Rasio Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Sumatera sebelum dan saat pandemi Covid-19. Sedangkan untuk rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio belanja operasi dan rasio efisiensi belanja tidak berbeda sebelum dan saat pandemi Covid-19. Kinerja keuangan pemerintah daerah saat Covid-19 menurun, sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan terutama pada pendapatan asli daerah yang belum mampu dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Begitu juga dengan pembangunan nasional yang terhambat, tercermin dari belanja modal yang juga menurun, dikarenakan fokus pemerintah daerah ialah penanganan dan pemulihan ekonomi pada saat pandemi Covid-19.

Kata Kunci : *Kemandirian, Efektivitas, Pertumbuhan, Belanja, Covid-19*

Abstract

The events of the Covid-19 pandemic that began in 2020 affected the financial performance of local governments in provinces on the island of Sumatra. This study aims to determine the impact on Regional Government Financial Performance before and during Covid-19 and to find out whether there were differences between before the Covid-19 Pandemic and during the Covid-19 Pandemic. There are 10 Provincial Governments throughout Sumatra that are used as research samples with saturated sampling techniques. This study uses secondary data derived from financial statements that have been audited by the BPK RI. This study uses a different test analysis tool. This study shows the results that there are significant differences in the average growth ratio and capital expenditure ratio of provincial governments in Sumatra before and during the Covid-19 pandemic. Meanwhile, the independence ratio, effectiveness ratio, operational expenditure ratio and expenditure efficiency ratio were not different before and during the Covid-19 pandemic. The financial performance of local governments during Covid-19 declined, in accordance with research that has been conducted, especially on regional original revenues which have not been able to be optimized by local governments. Likewise with hampered national development, a reflection of spending capital which has also decreased, due to the focus of the local government on handling and recovering the economy during the Covid-19 pandemic.

Keywords: *Independence, Effectiveness, Growth, Shopping, Covid-19*

1. PENDAHULUAN

Memasuki tahun 2020, sebuah fenomena yang sangat besar melanda hampir di seluruh belahan dunia dan termasuk Indonesia yaitu Pandemi *Covid-19*. Fenomena ini dinyatakan sebagai peristiwa paling menggemparkan yang menyebabkan kelumpuhan diberbagai aspek salah satunya sangat berdampak pada Keuangan. Kondisi Perekonomian global sebelum adanya Pandemi *Covid-19* masih menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Covid-19 telah mengubah kehidupan sosial ekonomi dunia secara drastis serta mengubah arah perekonomian global maupun nasional yang awalnya membaik malah keterbaliknya hingga dapat dikatakan menuju resesi. Kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, di mana setiap kenaikan kinerja keuangan kabupaten dan kota dikarenakan meningkatnya PAD daerah tersebut. Dimasa Pandemi *Covid-19* Pendapatan Asli Daerah diduga mengalami penurunan sehingga penanganan *Covid-19* banyak mengandalkan alokasi dana Pemerintah Pusat.

Menurut Marhawai (2015) Pendapatan pemerintah dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan antar pemerintah yang tinggi akan meningkatkan pusat kontrol pemerintah. Dengan demikian, pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan program kerjanya. Oleh karena itu, semakin besar pendapatan pemerintah akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut menjadi lebih baik.

Provinsi se-Pulau Sumatera berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,06 persen, kemudian pada tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 5,01 persen. Sedangkan secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,03 persen. Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengungkapkan, secara spesial atau wilayah pertumbuhan ekonomi nasional masih didominasi oleh pulau Jawa dan Sumatera dengan angka pertumbuhan ekonomi 5,51 persen untuk pulau Jawa, dan 4,43 untuk Pulau Sumatera atau di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dan juga

Pulau Sumatera merupakan bagian dari beberapa Provinsi yang ada di Indonesia yang sudah berdiri lama dan memiliki letak geografis yang sangat strategis. Provinsi-provinsi ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam hal ekonomi dan keuangan. Kondisi tersebut seharusnya menjadikan Pulau Sumatera memiliki potensi keuangan daerah yang cukup tinggi dan diharapkan mampu memiliki kinerja keuangan yang baik dalam menunjang pembangunan daerah.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan beberapa rasio keuangan diantaranya Kemandirian, Efektivitas, Pertumbuhan, Belanja Operasi, Belanja Modal dan Efisiensi Belanja yang bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan kinerja pemerintah di Provinsi se-Sumatera sebelum dan saat Pandemi *Covid-19*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu penilaian pemerintah dalam menghadapi situasi krisis.

2. TELAAH LITERATUR

2.1 Teori Stewardship

Teori stewardship sering disebut sebagai teori pengelolaan (penatalayanan), memandang manajemen sebagai steward (pelayan / penerima amanah / pengelola) akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi.

2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Akuntabilitas oleh pemerintah daerah perlu dinilai dengan pengukuran kinerja keuangan daerah. Di mana akuntabilitas bukan hanya mengenai masalah transparansi penggunaan dana, melainkan mempertanggungjawabkan efektivitas efisiensi dan unsur ekonomis penggunaan dana tersebut. Efisien sendiri merupakan suatu penggunaan dana masyarakat yang nantinya akan menghasilkan *output* yang maksimal, sedangkan efektif sendiri merupakan penggunaan anggaran yang pada akhirnya akan mencapai target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis yang selanjutnya berkaitan mengenai pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu

pada tingkat harga yang paling murah (Kusumadewi, 2021).

Maka dari itu perlu untuk mengetahui suatu daerah tersebut mampu atau tidak mengatur dan mengurus permasalahannya sendiri dilihat dari keadaan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Semakin efektif dan efisien pengelolaan keuangan daerah maka kemungkinan kinerja keuangan daerah akan semakin baik.

2.3 Analisis Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah suatu rumus yang digunakan untuk menilai perkembangan suatu perusahaan atau daerah, dengan menggunakan laporan keuangan periode tertentu sebagai bahan analisis atau anggaran tahun tertentu sebagai bahan evaluasi atau penjelasan ke depan (Karlina & Handayani, 2017; Dora, 2017).

2.3.1 Rasio Kemandirian

Apabila ketergantungan dari bantuan luar semakin rendah maka daerah tersebut akan semakin tinggi kemandiriannya. Tingkat kemandirian keuangan suatu daerah mengacu pada kemampuan daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pembangunannya, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepada mereka yang telah memenuhi kewajibannya, seperti membayar pajak dan retribusi, sebagai sumber pendapatan daerah (Kawatu, 2019).

Rumus Rasio Kemandirian menurut Halim (2008) yaitu:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat+Pinjaman}} \times 100\%$$

Paul Harvel dalam Halim (2001: 261) mengemukakan mengenai pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Tingkat Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan	Keterangan
-----------------------	---------------	------------

0 – 25	Instruktif	Rendah Sekali
25 – 50	Konsultatif	Rendah
50 – 75	Partisipatif	Sedang
75 - 100	Delegatif	Tinggi

Sumber : Halim, 2004.

2.3.2 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016). Rumus Rasio Efektivitas menurut Mahmudi (2016), yaitu:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

Tabel persentase rasio efektivitas:

Tabel 2
Tingkat Rasio Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, 2016

2.3.3 Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan gunanya untuk mengukur besarnya kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan ataupun meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari tahun ke tahun selanjutnya.

Rumus Rasio Pertumbuhan menurut Mahmudi (2019) yaitu:

$$\frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Pendapatan Th } (t-1)}{\text{Pendapatan Th } (t-1)} \times 100\%$$

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari satu periode ke periode berikutnya.

2.3.4 Rasio Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan biaya atau pengeluaran yang biasanya digunakan untuk kegiatan sehari-hari jangka pendek yang terdiri

dari tenaga kerja, barang dan jasa, dan subsidi, Palupi dkk (2022).

Rumus Rasio Belanja Operasi:

$$\frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

2.3.5 Rasio Belanja Modal

Persentase belanja modal yang diperhitungkan oleh belanja daerah antara 5%-20%.

Rumus Rasio Belanja Modal:

$$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

2.3.6 Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja Mahmudi (2016). Rasio efisiensi belanja biasanya digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

Rumus Rasio Efisiensi Belanja:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Efisiensi dapat diukur dengan menggunakan kriteria penilaian menurut Halim (2012):

Tabel 3
Tingkat Rasio Efisiensi Belanja

Efisiensi Keuangan Daerah Otonomi dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efisiensi (%)
Sangat Efisien	≤ 60
Efisien	> 60 – 80
Cukup Efisien	> 80 – 90
Kurang Efisien	> 90 – 100
Tidak Efisien	≥ 100

Sumber : Halim (2012)

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Macam-macam metode penelitian bisa dilihat dari landasan filsafat, data dan analisisnya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*).

Jenis data dari penelitian ini yaitu data Sekunder yang merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Metode Penelitian ini yaitu Metode Kuantitatif untuk mengukur Kinerja Keuangan dengan menggunakan Rasio Keuangan yang terdiri dari Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Pertumbuhan, Rasio Belanja Operasi, Rasio Belanja Modal dan Rasio Efisiensi Belanja seluruh Provinsi se-Sumatera.

3.2 Sumber Data

Sumber data pengkajian berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Seluruh Provinsi se-Sumatera tahun 2017 sampai dengan 2021 serta seluruh data-data yang berhubungan dengan pengkajian yang didapatkan di BPK-RI.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dengan data sekunder pada penelitian ini, yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran di Provinsi se-Sumatera Tahun 2017-2021 yang diperoleh dari BPK RI Perwakilan setiap Provinsi nya melalui laman <https://www.bpk.go.id/>

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

Menurut Ghazali (2018), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, modus (*mode*) dan standar deviasi dari masing-masing data sampel.

3.4.2 Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2018), uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang diperoleh merupakan data yang digunakan terdistribusi secara normal atau tidak.

3.4.3 UJI HIPOTESIS

3.4.3.1 Uji Beda Paired Sample T-Test

Menurut Ghozali (2018), Paired sample t-test merupakan uji beda dua sampel berpasangan. Sampel berpasangan merupakan subjek yang sama namun mengalami perlakuan yang berbeda.

3.4.3.2 Uji Beda Wilcoxon Signed Ranks Test

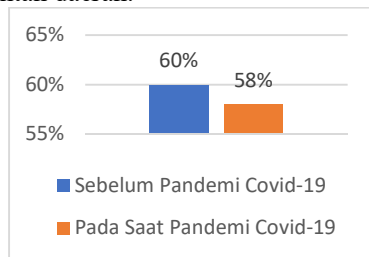
Uji beda Wilcoxon Signed Ranks digunakan sebagai alternatif dari Paired Sample T-Test apabila data yang digunakan menjadi sampel pada penelitian ini dinyatakan tidak terdistribusi secara normal berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov atau nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05.

4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis kinerja keuangan pada APBD yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai pada periode setelahnya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat suatu kecenderungan yang terjadi.

4.1 Analisis Rasio Kemandirian

Tingkat kemandirian pemerintah Provinsi Se-Sumatera sebelum dan pada saat pandemi *COVID-19* mengalami penurunan semula 60% menjadi 58% menunjukkan kemampuan keuangannya sedang. Dan membentuk pola hubungan partisipatif, merupakan pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang, karena tingkat kemandirian pemerintah Provinsi Se-Sumatera telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi akan beralih ke peran partisipasi pemerintah daerah.



Sumber : LHP BPK RI (data diolah 2023)

Grafik 1

Rasio Kemandirian Provinsi se-Sumatera

Implikasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi *COVID-19* tidak memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat

kemandirian daerah, karena tingkat kemandirian sebelum dan saat pandemi *COVID-19* masih tergolong cukup baik yang berarti peran PAD sudah baik dan tingkat ketergantungan pada dana perimbangan pemerintah pusat sudah berkurang.

Tabel 4

Hasil Uji Beda Kemandirian

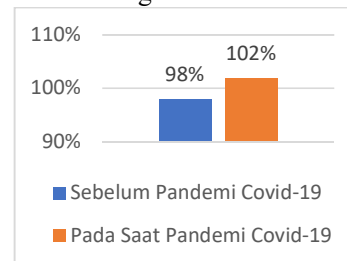
Uji beda wilcoxon		Sig. (2-tailed)
Pair 1	Sebelum-Pada Saat	.552

Sumber : Output SPSS (data diolah, 2023)

Berdasarkan hasil pengujian statistik Tabel uji Paired Sample T-Test, variabel Kemandirian, didapat nilai signifikansi Rasio Kemandirian sebesar sig = 0,552 > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa **tidak terdapat perbedaan** rata-rata tingkat Kemandirian sebelum dan pada saat Pandemi *COVID-19*.

4.2 Analisis Rasio Efektivitas

Efektivitas PAD pemerintah Provinsi yang ada di pulau Sumatera berdasarkan hasil rasio pada Gambar 4.4 menunjukkan bahwa adanya kenaikan sebelum dan pada saat pandemi *COVID-19* sebesar 4% yang semula sebesar 98% menjadi 102%, hal ini menyatakan bahwa kemampuan daerah provinsi Se-Sumatera sebelum pandemi *COVID-19* tergolong kriteria cukup efektif dalam mengelola keuangan dan dalam merealisasikan penerimaan PAD jika dibandingkan dengan target penerimaan PAD, sedangkan pada saat pandemi *COVID-19* menaik menjadi kriteria sangat efektif.



Sumber : LHP BPK RI (data diolah 2023)

Grafik 2

Rasio Efektivitas Provinsi se-Sumatera

Implikasi dari penelitian ini, menunjukkan bahwa meskipun mengalami kenaikan kinerja dalam aspek efektivitas sebesar 4%, tetapi tidak signifikan sehingga relatif sama sebelum dan pada saat pandemi *COVID-19*. Sehingga dalam

penelitian ini pada saat pandemi *covid-19* pemerintah daerah sudah dapat merealisasikan target PAD semakin membaik dari pada sebelum pandemi *covid-19*.

Tabel 5
Hasil Uji Beda Efektivitas

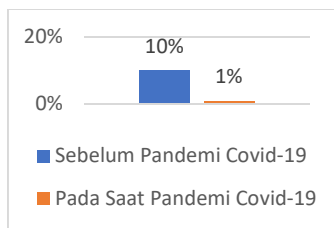
Uji beda paired sample		Lower	Upper	Sig. (2-tailed)
Pair 1	Sebelum-Pada Saat	-0.10473	.01073	.099

Sumber : Output SPSS (data diolah, 2023)

Berdasarkan hasil pengujian statistik Tabel uji Paired Sample T-Test, variabel Efektivitas, didapat nilai signifikansi Rasio Efektivitas sebesar $\text{sig} = 0,099 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa **tidak terdapat perbedaan** rata-rata tingkat Efektivitas sebelum dan pada saat Pandemi *Covid-19*.

4.3 Analisis Rasio Pertumbuhan

Pemerintah Daerah Provinsi Se-Sumatera mengalami penurunan rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah. Sebelum pandemi *covid-19* rata-rata rasio pertumbuhan PAD yaitu sebesar 10%. Tetapi pada saat pandemi *covid-19* mengalami penurunan rata-rata rasio pertumbuhan sebesar 1%.



Sumber : LHP BPK RI (data diolah 2023)

Grafik 3

Rasio Pertumbuhan Provinsi se-Sumatera

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan dalam aspek pertumbuhan kinerja keuangan daerah yang disebabkan karena realisasi PAD daerah tersebut mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun yang di sebabkan oleh kondisi pandemi *covid-19* yang terjadi. Pandemi *covid-19* memberikan dampak besar terhadap pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan hingga minus, dikarenakan kondisi ekonomi pembangunan mengalami perlambatan dan krisis global.

Tabel 6
Hasil Uji Beda Pertumbuhan

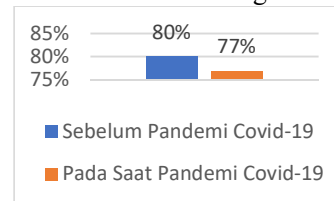
Uji beda paired sample		Lower	Upper	Sig. (2-tailed)
Pair 1	Sebelum-Pada Saat	.04964	.13236	.001

Sumber : Output SPSS (data diolah, 2023)

Berdasarkan hasil pengujian statistik Tabel uji beda Paired Sample T-Test, variabel Pertumbuhan, didapat nilai signifikansi Rasio Pertumbuhan sebesar $\text{sig} = 0,001 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa **terdapat perbedaan** rata-rata tingkat Pertumbuhan sebelum dan pada saat Pandemi *Covid-19*.

4.4 Analisis Rasio Belanja Operasi

Tingkat aktivitas belanja operasi sebelum pandemi *covid-19*, Provinsi Se-Sumatera rata-rata rasio belanja operasi sebesar 80% sedangkan pada saat pandemi *covid-19* mengalami penurunan rata-rata rasio belanja operasi menjadi 77%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah presentase dana yang dialokasikan pada belanja operasi (kegiatan sehari-hari) digunakan maka untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat di daerah cenderung semakin kecil.



Sumber : LHP BPK RI (data diolah 2023)

Grafik 4

Rasio Belanja Operasi Provinsi se-Sumatera

Implikasi dari penelitian ini, pada saat pandemi *covid-19* mengalami penurunan tingkat aktivitas belanja operasi sebesar 3%. Hal ini menunjukkan bahwa *covid-19* mempengaruhi pembangunan sarana dan prasarana, belanja operasi yang dikeluarkan daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana semakin rendah dibandingkan dengan belanja lainnya yang dikeluarkan daerah.

Tabel 7
Hasil Uji Beda Belanja Operasi

Uji beda paired sample		Lower	Upper	Sig. (2-tailed)
Pair 1	Sebelum-Pada Saat	.04964	.13236	.001

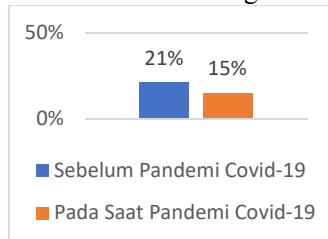
Pair 1	Sebelum-Pada Saat	- .04547	.11947	.337
--------	-------------------	----------	--------	------

Sumber : Output SPSS (data diolah, 2023)

Berdasarkan hasil pengujian statistik Tabel uji Paired Sample T-Test, variabel Aktivitas Belanja Operasi, didapat nilai signifikansi Rasio Aktivitas Belanja Operasi sebesar $\text{sig} = 0,377 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa **tidak terdapat perbedaan** rata-rata tingkat Aktivitas Belanja Operasi sebelum dan pada saat Pandemi *Covid-19*.

4.5 Rasio Belanja Modal

Tingkat aktivitas belanja modal sebelum pandemi *covid-19*, Provinsi Se-Sumatera rata-rata rasio belanja operasi sebesar 21% sedangkan pada saat pandemi *covid-19* mengalami penurunan rata-rata rasio belanja operasi menjadi 15%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah presentase dana yang dialokasikan pada belanja modal (pelayanan publik) digunakan maka untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi pembangunan masyarakat di daerah cenderung semakin kecil.



Sumber : LHP BPK RI (data diolah 2023)

Grafik 5

Rasio Belanja Modal Provinsi se-Sumatera

Implikasi dalam penelitian ini, pada saat pandemi *covid-19* pemerintah daerah yang ada di pulau Sumatera telah melakukan rasionalisasi belanja daerah, dengan cara belanja barang jasa dan belanja modal yang nantinya akan dilakukan sebuah pengurangan sebanyak harus dikurangi sebanyak 50 persen. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saja telah melakukan refocusing dan realokasi anggaran dengan rasionalisasi sebesar 1,08% yang terfokus pada rasionalisasi belanja modal, belanja tidak terduga, belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.

Tabel 8

Hasil Uji Beda Belanja Modal

Uji beda paired sample	Lower	Upper	Sig. (2-tailed)

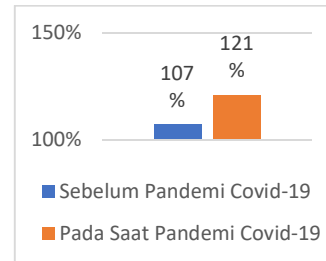
Pair 1	Sebelum-Pada Saat	.02601	.07999	.002
--------	-------------------	--------	--------	------

Sumber : Output SPSS (data diolah, 2023)

Berdasarkan hasil pengujian statistik Tabel uji Paired Sample T-Test, variabel Aktivitas Belanja Modal, didapat nilai signifikansi Rasio Aktivitas Belanja Modal sebesar $\text{sig} = 0,002 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa **terdapat perbedaan** rata-rata tingkat Aktivitas Belanja Modal sebelum dan pada saat Pandemi *Covid-19*.

4.6 Rasio Efisiensi Belanja

Tingkat Efisiensi Belanja sebelum pandemi *covid-19* Pemerintah Provinsi Se-Sumatera merupakan daerah dengan kinerja keuangan yang tidak efisien yang dilihat rata-rata rasio efisiensi bernilai ≥ 100 . Sedangkan pada saat pandemi *covid-19* tingkat efisiensinya tetap berada pada skala tidak efisien rata-rata rasio efisiensi ≥ 100 . Hal ini berarti bahwa pemerintah Provinsi Se-Sumatera masih kurang efisien dalam mengelola keuangan daerah baik sebelum pandemi *covid-19* maupun pada saat pandemi *covid-19*.



Sumber : LHP BPK RI (data diolah 2023)

Grafik 6

Rasio Efisiensi Belanja Provinsi se-Sumatera

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi *covid-19* tidak memberikan dampak yang signifikan dalam aspek efisiensi walaupun meningkat tinggi. Hal ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan daerah pada saat pandemi *covid-19* mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum pandemi *covid-19* dan juga disisi pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah semakin menurun. Biaya yang meningkat didominasi oleh pengeluaran yang berfokus dalam penanganan dan pemulihan pandemi *covid-19*.

Tabel 9

Hasil Uji Beda Efisiensi Belanja

Uji beda wilcoxon		Sig. (2-tailed)
Pair 1	Sebelum-Pada Saat	.484

Sumber : Output SPSS (data diolah, 2023)

Berdasarkan hasil pengujian statistik Tabel uji Paired Sample T-Test, variabel Efisiensi Belanja, didapat nilai signifikansi Rasio Efisiensi Belanja sebesar $\text{sig} = 0,484 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa **tidak terdapat perbedaan** rata-rata tingkat Efisiensi Belanja sebelum dan pada saat Pandemi *Covid-19*.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa analisis data maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada Rasio Kemandirian Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Sebelum dan Pada Saat Pandemi *Covid-19*.
2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada Rasio Efektivitas Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Sebelum dan Pada Saat Pandemi *Covid-19*.
3. Terdapat perbedaan yang signifikan pada Rasio Pertumbuhan Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Sebelum dan Pada Saat Pandemi *Covid-19*.
4. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada Rasio Kecerahan Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Sebelum dan Pada Saat Pandemi *Covid-19*.
5. Terdapat perbedaan yang signifikan pada Rasio Kecerahan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Sebelum dan Pada Saat Pandemi *Covid-19*.
6. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Sebelum dan Pada Saat Pandemi *Covid-19*.

5.2 Saran

1. Diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi se-Sumatera mampu meningkatkan kinerja keuangannya dengan cara terus menggali semua potensi yang ada di seluruh daerah yang ada di Pulau Sumatera untuk meningkatkan pemungutan PAD secara aktif dan insentif agar kinerja keuangan di daerah terus mengalami peningkatan.

2. Diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi se-Sumatera dapat memiliki rencana dan tindakan yang tepat ketika dihadapkan dengan kondisi yang sama seperti Pandemi *Covid-19*, agar pengalokasian dana berjalan dengan baik. Serta. Memiliki persiapan yang matang dalam menyusun program yang lebih efisien dan efektif guna untuk pembangunan publik dibandingkan dengan anggaran yang bersifat operasional pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Dora, J. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Ghozali, I. (2018). *“Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS”* Edisi Sembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karlina, A., & Handayani, N. (2017). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(3).
- Kawatu, F. S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. CV BUDI UTAMA.
- Kusumadewi, V. P. 2021. Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015-2019. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. 6 (1) : 17-29. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>.

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.

Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Marhawai (2015). Pengaruh ukuran legislatif, kemakmmuran pemerintah daerah dan

- intergovernmental revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi pada kabupaten/kota di Aceh). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 8(1), 49-58.
- Palupi, Dyah, dkk. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2019-2021. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. 6 (3) : 1819-1832.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. Hal. 3, 9, 63, 64, 94, 99, 119, 120, 123-125, 240.